

B-6



DIK RUTIN

## LAPORAN AKHIR PENELITIAN

# IMPLEMENTASI ARTICLE VI GATT 1994 (*GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE*) TENTANG DUMPING DALAM PERATURAN HUKUM INDONESIA (*STUDI PENGARUH DUMPING BAGI PERDAGANGAN INTERNASIONAL INDONESIA*)

Oleh :

**Nuswantoro Dwiwarno, SH**

---

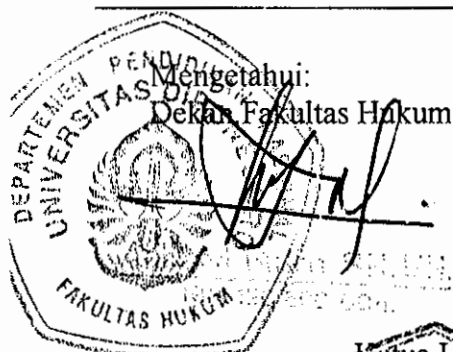
Dibiayai Oleh Dana DIK Rutin Universitas Diponegoro, sesuai Surat Perjanjian  
Pelaksanaan Penelitian Tanggal 1 Mei 2002 Nomor : 120/j07.11 PJJ/PL/2002

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
2002**

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PENELITIAN DIK RUTIN

1. a. Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI ARTICLE VI GATT (GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE) 1994 DALAM PERATURAN HUKUM INDONESIA**
- b. Bidang Ilmu : Ilmu Hukum
- c. Kategori Penelitian: II
- 2 Ketua Peneliti
  - a. Nama Lengkap dan Gelar : Nuswantoro Dwiwarno, SH,
  - b. Jenis Kalam : Laki-Laki
  - c. Golongan dan NIP : III B / 132 056 165
  - d. Jabatan Fungsional : Assisten Ahli
  - e. Jabatan Struktural : -
  - f. Fakultas / Bagian : Hukum / Hukum Internasional
  - g. Pusat Penelitian :
- 3 Jumlah Anggota Pelaksana : --
  - a. Nama Anggota Peneliti I : --
  - b. Nama Anggota Peneliti II : --
- 4 Lokasi Penelitian : Semarang dan Jakarta
- 5 Kerjasama dengan institusi Lain :
- 6 Lama Penelitian : 6 (Enam) bulan
- 7 Biaya yang Diperlukan
  - Sumber dari Depdiknas : Rp. 3.000.000,00
  - Sumber lain, sebutkan... : -
  - Jumlah : Rp. 3.000.000,00

Semarang, 1 November 2002

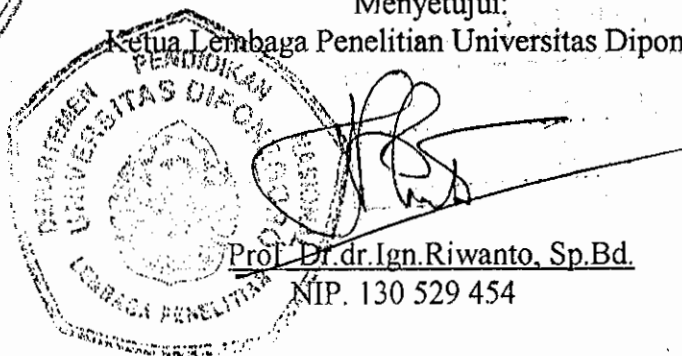


Pelaksana,

Nuswantoro Dwiwarno, SH.  
NIP. 132 056 165

Menyetujui:

Ketua Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro



Prof. Dr. dr. Ign. Riwanto, Sp.Bd.  
NIP. 130 529 454

## RINGKASAN

Proses globalisasi dalam bidang perdagangan serta perkembangan di beberapa bidang lain, merupakan salah satu alasan bersatunya perekonomian antar bangsa, dimana hal ini mengakibatkan terjalinnya saling ketergantungan dan berintegrasinya ekonomi nasional dalam perekonomian global, dalam suatu mekanisme pasar yang dijiwai persaingan yang makin ketat. Ketatnya persaingan antar pelaku ekonomi, ternyata juga mendorong dilakukannya persaingan curang (*unfair competition*), baik dalam bentuk harga maupun non harga, misalnya dumping, penetapan quota impor, pengenaan pajak yang tinggi terhadap produk-produk impor dan lain sebagainya.

Pemerintah melalui regulasi-regulasinya terkadang juga turut menciptakan kondisi dengan memberi kemudahan-kemudahan pada para pengusaha domestik yang sifatnya diskriminatif, dimana kebijakan tersebut bertentangan dengan persetujuan umum tentang perdagangan internasional GATT. Tindakan dan kebijakan yang kurang tepat tersebut dapat berakibat sebaliknya, karena baik eksportir maupun pemerintah dapat dituduh telah melakukan dumping terhadap produk ekportnya dan pada gilirannya nanti tidak mustahil apabila produk-produk ekspor yang dituduh dumping dari negara tersebut akan dihentikan pemasarannya di negara importir dan negara exportir harus membayar biaya masuk anti dumping (*anti dumping duties*) kepada importir yang merasa dirugikan. Adanya kewajiban membayar anti dumping duties maupun tindakan balasan sepihak selama proses penyelidikan dumping, akan berdampak pada penurunan quota ekport yang pada gilirannya turut mempengaruhi pemasukan devisa negara. Sebaliknya, apabila terdapat produk import yang masuk dan dijual dengan harga dumping, juga akan berpengaruh terhadap penjualan produk domestik yang dapat menyebabkan perusahaan-perusahaan domestik merugi dan bangkrut.

Oleh karenanya fenomena ini dirasa sangat penting untuk dilakukan penelitian guna mengkaji ketentuan-ketentuan hukum dan praktek empiris yang berkaitan dengan masalah dumping, sehingga Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut menandatangani persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi perdagangan bebas.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan nikmat dari-Nya kegiatan penelitian ini dapat diselesaikan, sampai dengan penulisan laporan akhir.

Penelitian tentang “Implementasi *Article VI* GATT 1994 (*General Agreement on Tariffs and Trade*) Dalam Peraturan Hukum Indonesia” ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa bantuan semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian penelitian ini.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Undip yang telah memberikan bantuan moril. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ketua Lembaga Penelitian Undip yang telah memungkinkan dikucurkan dana dari DIK Rutin untuk membiayai penelitian ini. Kepada kawan-kawan sejawat di Fakultas Hukum Undip yang ikut memperkaya studi ini melalui diskusi-diskusi. Yang tak kalah pentingnya, kami mengucapkan terima kasih kepada para pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Undip dan Perpustakaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan beserta para staff yang telah banyak membantu sehingga kami memperoleh bahan-bahan penelitian.

Terakhir, kami ingin sampaikan bahwa sebagaimana manusia biasa, tentunya kami menyadari bahwa studi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengundang kritik dan diskusi dari berbagai pihak untuk memperbaiki studi ini. Kami hanya bisa berharap, semoga studi ini dapat memberikan manfaat.

Semarang, November 2002  
Peneliti,

Nuswantoro Dwiwarno

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Ringkasan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	v
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	3
C. Tinjauan Pustaka .....	3
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian .....	11
<b>BAB II. GLOBALISASI DAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA</b>	
A. Globalisasi .....	4
B. Pembangunan Ekonomi Indonesia .....	6
<b>BAB III. HUBUNGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DENGAN PEMBANGUNAN EKONOMI</b>	
A. Tinjauan Umum Perdagangan Internasional .....	25
B. Pembangunan Ekonomi dan Perdagangan Internasional .....	34
<b>BAB IV. DUMPING</b>	
A. GATT 1994 Sebagai Aturan Perdagangan Internasional .....	41
B. Tinjauan Umum Tentang Dumping .....	44
C. Pengaruh Dumping Terhadap Perdagangan Internasional .....	50
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran-Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejak terpecahnya negara Uni Sovyet dan bersatunya Jerman Barat dan Timur telah menandai dan menjadi momentum makin terbukanya negara-negara blok timur. Imbas dari pergeseran sejarah tersebut adalah berubahnya paradigma peta politik dunia, yang tidak lagi didasarkan atas kepentingan ideologi, tetapi lebih diwarnai dengan masalah hak azasi manusia (HAM) dan kepentingan-kepentingan ekonomi negara.

Disisi lain, kemajuan teknologi menyebabkan lajunya arus komunikasi dan transportasi antar negara seolah-olah telah menghapuskan batas-batas geografis negara-negara. Gerakan inilah yang kemudian dikenal dengan globalisasi. Laju globalisasi ternyata telah merambah pada kegiatan finansial, produksi, investasi dan juga perdagangan, yang kemudian mengimbas juga pada tata hubungan ekonomi antar bangsa. Proses tersebut menyebabkan meningkatnya kadar hubungan saling ketergantungan antar bangsa, bahkan menimbulkan proses menyatunya ekonomi dunia. Oleh karenanya laju globalisasi mampu membuat perubahan struktural, dimana batas-batas geografis negara seolah-olah menjadi kabur dimana dunia dibuat semakin *borderless* dalam batas-batas wilayah maupun bidang perdagangan internasional.

Proses globalisasi dalam bidang perdagangan serta perkembangan beberapa bidang lain merupakan salah satu alasan bersatunya perekonomian antar bangsa, dimana hal ini mengakibatkan terjalinnya saling ketergantungan dan berintegrasinya ekonomi nasional dalam perekonomian global, dalam suatu mekanisme pasar yang dijiwai persaingan yang makin ketat. Ketatnya persaingan antar pelaku ekonomi, ternyata juga mendorong dilakukannya persaingan curang (*unfair competition*), baik dalam bentuk tarif maupun non tarif (*non tariffs barrier*) seperti misalnya perlakuan yang diskriminatif terhadap importir, dumping, pengenaan pajak yang tinggi terhadap produk-produk impor dan lain sebagainya.

Berdasarkan kondisi serta alasan-alasan tersebut, beberapa negara mendesak segera dirampungkan perundingan perdagangan yang sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1947. Baru tahun 1993 di Marakesh-Maroko, berhasil disepakati perjanjian umum tentang perdagangan internasional yang dikenal dengan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994 yang telah ditandatangani oleh 124 negara.

Sebagai anggota/*contracting parties* yang turut menandatangani persetujuan perdagangan tersebut, sudah selayaknya Indonesia harus mentaati berdasarkan azas *ceteris paribus* dalam perjanjian internasional. Akan tetapi, disisi lain Indonesia harus melindungi kepentingan nasionalnya terutama terhadap industri-industri domestiknya agar tidak gulung tikar bersaing dengan industri dari negara-negara maju. Oleh karenanya fenomena ini sangat menarik untuk diteliti, terutama Dumping sebagaimana diatur dalam

article VI GATT, yang mana dianggap sebagai praktek perdagangan yang tidak jujur (*unfair trade practice*)

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut diatas dalam penelitian ini hendak mengkaji permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah implementasi pengaturan dumping menurut *Article VI* GATT 1994 dalam peraturan hukum Indonesia ?.
- b. Mengapa eksportir melakukan dumping ?.

## **C. TINJAUAN PUSTAKA**

### **C.1. Sistem dan Pembangunan Ekonomi Indonesia**

Pembangunan ekonomi merupakan prioritas dalam perencanaan pembangunan suatu bangsa, demikian dikatakan oleh Tsion Menghitsu Fiseha (Universiteit van Amsterdam, 1988) sebagaimana dikutip Normin S Pakpahan.<sup>1</sup> Pertumbuhan ekonomi yang baik yaitu apabila pertumbuhan ekonomi tersebut lebih tinggi daripada pertumbuhan jumlah penduduk, sehingga dapat mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu negara hanya dicapai melalui berbagai kebijaksanaan. Tanpa adanya pertumbuhan ekonomi dapat dipastikan kondisi negara tidak beranjak dari kondisi semula.

---

<sup>1</sup> Normin S Pakpahan dan Peter Mahmud, Kertas Kerja; Pemikiran Ke Arah Pembaharuan Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia, Jakarta; Proyek Elips, 1996, hal.1



Pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses, di mana sebuah perekonomian mencapai suatu gerakan ke atas atau transformasi seluruh sistem sosio-ekonomis, dan termasuk di dalamnya perbaikan-perbaikan dalam kualitas sumber-sumber daya, maupun perubahan-perubahan positif pada sikap, lembaga-lembaga atau pranata serta nilai-nilai.<sup>2</sup> Dalam kaitan ini pembangunan ekonomi berarti pengolahan kekuatan ekonomi potensiil menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen.

Dengan kata lain, pembangunan ekonomi adalah proses, di mana output atau pendapatan nyata perkapita (GNP) suatu sistem perekonomian meningkat dalam jangka panjang. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh dalam rangka itu antara lain menawarkan investor pada penanam modal, peningkatan ekspor, menyiapkan prasarana dan sarana serta mengupayakan persaingan yang sehat. Singkatnya, kebijakan yang dijalankan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi suatu negara yang dilakukan dengan jalan industrialisasi akan meningkatkan aktivitas perekonomian dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat tersebut<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Winardi, *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Tarsito, Bandung: 1983; hal 6

<sup>3</sup> Mulia Nasution, *Teori Ekonomi Makro, Pendekatan pada Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1997, halaman 16-21.

Demikianlah bahwa tujuan pembangunan ekonomi Indonesia adalah untuk meningkatkan kemakmuran rakyatnya sebagaimana tertuang dalam konstitusi dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Berkaitan dengan tujuan nasional pembangunan ekonomi yang hendak dicapai oleh suatu negara, akan berpengaruh pada perbedaan bentuk dan sistem ekonomi masing-masing bangsa. Perbedaan bentuk dan sistem ekonomi suatu negara bukanlah ditentukan oleh lembaga yang ada tetapi dipengaruhi oleh ciri khas masing-masing bangsa, antara lain sejarah sosial, bentuk pemilikan sumber daya, pandangan hidup maupun nilai kebudayaan.

Sistem perekonomian di sini dapat diartikan sebagai keseluruhan lembaga ekonomi yang dilaksanakan/dipergunakan oleh suatu bangsa atau negara dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Beberapa pendapat mengatakan bahwa secara umum sistem ekonomi bersumber dari dua corak yaitu individualistis dan kolektivitas, dan terdapat dua bentuk sistem ekonomi yaitu sistem komando dan sistem pasar<sup>4</sup>. Indonesia menganut sistem ekonomi campuran, yaitu perpaduan antara sistem komando dan sistem pasar, telah mempunyai landasan hukum sistem ekonomi yang kuat sebagai nilai dasar, yaitu pasal 33 Undang-undang Dasar (UUD) 1945, yang didukung pasal 27 (2) dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.

---

<sup>4</sup> Ibid, hal 37.

Dalam pasal 33 tercantum konsepsi demokrasi ekonomi, di mana perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan asas kebersamaan dan asas kekeluargaan inilah dikembangkan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran bersama, bukan kemakmuran orang per orang. Dalam arti, setiap individu mempunyai hak dan kesempatan yang sama ikut andil dalam proses produksi untuk memperoleh penghasilan<sup>5</sup>

Dengan demikian, dalam demokrasi ekonomi melarang timbulnya konsentrasi kekuatan ekonomi pada pihak-pihak tertentu yang akan memporak-porandakan asas kebersamaan. Kesejahteraan bersama dapat segera terwujud bila terdapat integrasi antara badan usaha milik swasta, pemerintah dan koperasi selaku pilar-pilar ekonomi nasional, mempunyai persamaan persepsi tentang asas kebersamaan.

## **C.2. Globalisasi Ekonomi**

Adanya peningkatan teknologi informasi yang tinggi, masyarakat tidak bisa lagi menutup diri dari luar karena teknologi informasi mampu menembus batas-batas wilayah kekuasaan negara. Lain daripada itu, dengan kemajuan teknologi akan melahirkan kepedulian yang tinggi dari masyarakat luas. Kondisi ini akan berakibat

---

<sup>5</sup> Mubyarto, Ekonomi Pancasila : Gagasan Dan Kemungkinan. LP3ES, Jakarta; 1987; hal 35

pula pada sistem ekonomi nasional suatu negara yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari sistem ekonomi global<sup>6</sup>.

Diakui atau tidak, munculnya globalisasi yang mengimbas di bidang ekonomi khususnya perdagangan internasional, merupakan akibat dari tindakan negara-negara maju melakukan liberalisasi ekonomi yang didukung oleh pesatnya kemajuan sektor informasi dan komunikasi yang dimilikinya. Kondisi demikian ini berakibat munculnya kompleksitas perdagangan dunia serta persaingan antar negara semakin ketat. Ketatnya persaingan tidak saja bagaimana negara-negara berlomba meningkatkan perdagangan ekspor, tetapi juga harus meningkatkan kualitas agar komoditi eksportnya diterima konsumen dunia.

Menurut Theodore Levitt, yang dimaksud dengan globalisasi ekonomi adalah proses munculnya realitas komersial baru, yang diwarnai dengan adanya homogenitas selera dan preferensi konsumen. Di sini terjadi konvergensi global, yang karenanya dunia harus dilihat sebagai suatu pasar bebas. Tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas, Michael Porter, merumuskan globalisasi ekonomi sebagai keadaan di mana persaingan antar perusahaan tidak lagi dibatasi oleh batas-batas wilayah negara. Yang terjadi justru sebaliknya, daya saing satu perusahaan di salah satu belahan bumi (negara) amat dipengaruhi oleh daya saing perusahaan tersebut di belahan bumi (negara) yang lain<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Juwono Sudarsono, *Politik Ekonomi dan Strategi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995, hal. 56.

<sup>7</sup> Pandji Anoraga, *Perusahaan Multi Nasional, Pengalaman Modal Asing*. Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, hal 23.

Arus globalisasi ekonomi dunia ini terjadi karena sejumlah faktor, yang antara lain adalah karena kemajuan di bidang teknologi informasi, komunikasi dan transportasi. Di samping itu juga, pesatnya pertumbuhan sektor pariwisata, terdapatnya sistem moneter dan perdagangan dunia yang relatif mapan, dan munculnya kekuatan ekonomi yang makin berimbang antara Amerika Serikat, Eropa Barat dan Jepang, merupakan faktor kekuatan lain yang mendorong proses globalisasi dunia<sup>8</sup>.

### C.3. Dumping dan Perdagangan Internasional

Dalam hasil-hasil Perundingan Uruguay, ketentuan dumping diatur dalam Annex 1A: *Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994* yang menjadi bagian integral dan tidak terpisahkan dari persetujuan umum tentang perdagangan GATT 1994 (*General Agreement on Tariffs and Trade*), dan oleh karenanya harus ditaati oleh semua negara anggota yang telah meratifikasinya.

Pengertian dumping diatur dalam Pasal 2 Paragraf 2.1. yaitu:

*"For the purpose of this agreement, a product is to be considered as being dumped, i.e. introduced into the commerce of another country at less than its normal value."*<sup>8</sup> Terjemahan bebas dari arti tersebut adalah untuk tujuan dari persetujuan ini, suatu produk dianggap sebagai

---

<sup>8</sup> Lihat Uruguay Round, Final Act, Departemen Perdagangan, Jakarta 1994, halaman 145.

dumping, misalnya diperkenalkan (dijual) dalam perdagangan di negara lain yang kurang dari nilai normalnya<sup>9</sup>.

Pengertian dumping menurut kamus ekonomi diartikan sebagai praktek dagang yang dilakukan eksportir dengan menjual komoditi di pasaran internasional dengan harga kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah daripada harga barang tersebut di negerinya sendiri atau daripada harga jual kepada negara lain; pada umumnya, praktik ini dinilai tidak adil karena dapat merusak pasaran dan merugikan produsen pesaing di negara pengimpor<sup>10</sup>. Jadi, secara singkat dapat dikatakan bahwa barang dumping adalah barang yang diimpor dengan tingkat harga ekspor yang lebih rendah dari nilai normalnya di negara pengekspor<sup>11</sup>.

Suatu negara dapat menuduh dumping terhadap produk impor dari negara lain apabila nyata-nyata telah terbukti bahwa:<sup>12</sup>

1. Adanya produk impor yang dijual dengan harga dumping
2. Timbulnya kerugian (*injury*) atau ancaman kerugian
3. Adanya hubungan secara langsung (*causal link*) antara kerugian yang timbul dengan produk yang dijual dengan harga dumping

Ketiga persyaratan tersebut harus dipenuhi agar penyelidikan terhadap dumping dapat ditindaklanjuti. Sekalipun demikian, tidak ada

<sup>9</sup> Lihat Persetujuan Akhir, Putaran Uruguay, Terjemahan Resmi Bidang Perdagangan Multilateral, Departemen Perdagangan, Jakarta, 1994

<sup>10</sup> Elly Erawaty, dan J.S. Badudu. Kamus Hukum Ekonomi, Jakarta, Komponen Pengembangan Hukum Ekonomi Proyek Elips, 1996, halaman 39.

<sup>11</sup> Lihat Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan.

yang salah terhadap dumping apabila terbukti bahwa hanya dumping sebagai satu-satunya bukti. Maksudnya, meskipun telah terjadi produk impor dengan harga dumping, apabila tidak menimbulkan kerugian bagi produk-produk sejenis di negara pengimpor, tindakan dumping tidak dapat dikenakan terhadap barang dengan harga dumping tersebut (*deminimise*). Bahkan sebaliknya konsumen diuntungkan karena dapat memilih produk-produk alternatif lain dengan harga yang relatif lebih murah.

Demikian halnya dengan faktor yang ketiga, harus dibuktikan adanya hubungan sebab – akibat (*causal link*) antara kerugian dan atau ancaman kerugian materiil yang timbul dikarenakan adanya impor dengan harga dumping. Sebab tanpa dapat dibuktikan adanya hubungan sebab-akibat antara kedua faktor itu kerugian atau ancaman kerugian materiil yang diderita industri dalam negeri mungkin disebabkan faktor-faktor lain, misalnya menurunnya daya beli masyarakat, berkurangnya minat masyarakat terhadap produk produk yang ada di pasaran dan lain sebagainya.

#### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi para eksportir tentang dumping serta kesiapan pemerintah melalui regulasi-regulasinya dalam menghadapi persaingan perdagangan bebas.

---

<sup>12</sup> Ibid. Pasal 3.5, halaman 175.

Berdasarkan dari tujuan umum tersebut, beberapa kegiatan akan dilakukan secara aplikatif dan akademis yang dimaksudkan untuk mencapai beberapa tujuan khusus, antara lain:

- a. Mengkaji ketentuan-ketentuan Pasal VI dari GATT 1994 tentang dumping dan implementasinya dalam peraturan hukum Indonesia
- b. Menganalisis alasan-alasan eksportir menjual produknya dengan harga dumping.

## E. METODE PENELITIAN

### 1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*) dan yuridis empiris, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan, undang-undang, yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara yang berdaulat.<sup>13</sup>

Adapun tendensi dipilihnya pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris ini adalah untuk menemukan hukum bagi suatu perkara *in concreto* atau hukum klinis (*clinical legal research*), guna menyelesaikan suatu perkara tertentu dan dapat menemukan bunyi peraturan hukum tersebut.<sup>14</sup> Selain itu karena permasalahan yang hendak diteliti berkisar pada peraturan perundang-perundangan, baik yang bersifat internasional

<sup>13</sup> Rony Hanitjo Soemitro, *Metoda Penelitian Hukum*, Makalah pada Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Semarang; Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum-Undip, 1999, halaman 11.

<sup>14</sup> Ibid. Lihat juga Soeryono Sukanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1985, halaman 15-20.



maupun nasional yang mana masing-masing saling berhubungan serta implementasinya dalam praktek.

## 2. Teknik Pengumpulan data.

Pengumpulan data akan dilakukan dengan melakukan wawancara dan study dokumenter. Wawancara dilakukan secara terstruktur untuk mendapatkan data primer<sup>15</sup> sehingga dapat mengungkapkan maksud, motivasi maupun penjelasan secara mendalam tentang pokok masalah, yang diambil dari pendapat sarjana di bidang ilmu hukum dan orang yang menguasai benar dan berkompeten dalam perdagangan ekspor.

Sedangkan studi dokumenter dilakukan untuk memperoleh data-data sekunder baik yang bersifat pribadi atau publik dalam bentuk dokumen maupun bahan pustaka, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (penunjang). Hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul dapat deskripsikan dengan sistematis secara teliti dan akurat.

## 3. Analisa Data

Analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Pengertian analisis ini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis, dan konsisten, dimana akan dilakukan penganalisaan data secara rinci dan mendalam guna menemukan azas-azas dan informasi untuk memecahkan persoalan hukum in concreto.

Dalam Analisis data kualitatif terdiri dari tiga jalur yang akan dilakukan secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.<sup>15</sup> Data yang diperoleh kemudian akan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis, karena akan menguraikan atau mendeskripsikan peraturan perundangan maupun perjanjian-perjanjian internasional yang berlaku, dikaitkan dengan kasus-kasus hukum bidang ekonomi yang terjadi.

---

<sup>15</sup> Ibid, halaman 12

<sup>16</sup> Matthew B.Miles dan A.Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, Cetakan Pertama, Jakarta: UI Press, 1992, halaman 16.

## **BAB II**

### **GLOBALISASI DAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA**

#### **A. Globalisasi**

##### **A.1. Beberapa Kondisi Pendorong Globalisasi**

Menurut Theodore Levitt, yang dimaksud dengan globalisasi ekonomi adalah proses munculnya realitas komersial baru, yang diwarnai dengan adanya homogenitas selera dan preferensi konsumen. Di sini terjadi konvergensi global, dan oleh karenanya dunia harus dilihat sebagai suatu pasar bebas. Kemudian Michael Porter merumuskan globalisasi ekonomi sebagai keadaan di mana persaingan antar perusahaan tidak lagi dibatasi oleh batas-batas wilayah negara. Yang terjadi justru sebaliknya, daya saing suatu perusahaan di salah satu negara amat dipengaruhi oleh daya saing perusahaan dibelahan bumi (negara) yang lain.<sup>17</sup>

Arus globalisasi ekonomi terjadi karena sejumlah faktor, antara lain kemajuan di bidang teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi. Para sarjana telah sepakat bahwa globalisasi merupakan tuntutan dari adanya kemajuan dari ketiga bidang tersebut. Dengan kemajuan teknologi misalnya, menjadikan negara-negara yang mampu menguasai dan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memikirkan bagaimana menjual hasil produknya tersebut tidak hanya terbatas pada kelompok dagangnya saja, tetapi juga kepada negara-negara yang tidak sealian idiologi.

Di samping itu juga adanya sistem moneter dan perdagangan dunia yang relatif mapan serta munculnya kekuatan ekonomi negara-negara industri baru (*newly industrial countries*) seperti Jepang beserta negara-negara di benua Asia yang makin mengimbangi negara-negara industri maju seperti Amerika Serikat dan Eropa Barat, merupakan faktor kekuatan lain yang mendorong proses globalisasi dunia.

Hal lain yang turut mempengaruhi arus globalisasi perdagangan internasional adalah munculnya blok-blok perdagangan regional antar benua. Keberadaan *European Economic Community (EEC)*, *North American Free Trade Area (NAFTA)*, *Asian Free Trade Area (AFTA)* dan berbagai kelompok blok perdagangan lainnya, semakin memaksa negara-negara berkembang khususnya, untuk lebih kompetitif dalam pasar internasional. Munculnya *trade block* dalam jangka panjang juga mengubah pola perdagangan bilateral menuju kepada pola perdagangan antar blok yang pada gilirannya lebih luas lagi yaitu perdagangan dalam sistem pasar global. Kondisi ini menuntut diversifikasi pasar yang lebih jauh untuk mengembangkan pasar ekspor Indonesia tidak hanya pada mitra dagangnya yang hanya satu blok regional saja, tetapi jauh lebih besar dalam pasar global.

#### **A.2. Implikasi Globalisasi bagi Negara-negara Berkembang.**

Pergerakan globalisasi ekonomi di seluruh penjuru dunia tidak mungkin dielakkan, karena kita akan kehilangan momentum sejarah bila

---

<sup>17</sup> Panji Anaroga, *Perusahaan Multi Nasional, Penanaman Modal Asing*, Jakarta; Pustaka Jaya, 1995, halaman 23.

mengisolasi diri<sup>18</sup>. Disisi lain, globalisasi ekonomi juga turut menyokong munculnya persaingan perdagangan internasional yang sangat ketat, sehingga dirasa sangat berat bagi negara-negara berkembang yang berusaha sejajar dengan negara maju dalam dunia perdagangan internasional.

Implikasi dari globalisasi adalah sebuah kompetisi dalam pasar internasional. Bagi Indonesia sebagai bangsa yang sedang membangun, ini berarti mau tidak mau suka tidak suka harus berhadapan dan bersaing ketat dengan negara-negara industri yang sudah maju lebih dulu di bidang perdagangan internasional. Oleh karena itu bagi negara-negara berkembang perlu memikirkan dan sekaligus *mensetting* strategi pemasaran yang matang untuk memenangkan persaingan.

Tuntutan kondisi seperti tersebut diatas menjadi alasan bagi negara-negara melakukan restrukturisasi ekonominya. Hal itu juga menjadi salah satu alasan bagi Indonesia meletakkan motor penggerak pertumbuhannya pada sektor ekspor serta mengintensifkan penerimaan pajak dan mobilisasi dana dalam negeri. Karena menurut beberapa sarjana ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada sektor ekspor saja pada akhirnya akan menuntut efisiensi tinggi untuk kompetisi dalam pasar global<sup>19</sup>.

Adanya globalisasi yang mengakibatkan makin terkaitnya pasar internasional, baik pasar uang maupun barang, sebenarnya juga memberi peluang pada peningkatan ekspor negara-negara berkembang. Selain itu munculnya perkembangan negara-negara industri baru seperti Korea, Taiwan

---

<sup>18</sup> Habibie, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pembangunan Bangsa, Menuju Demensi Baru

dan Singapura misalnya, memberi kesempatan terjadinya relokasi industri dari negara-negara tersebut ke negara-negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki *labour cost* yang relatif rendah, bahan baku produksi, serta produk-produk lain seperti *garment, furniture, electronic* dan *footwear*.

Laju globalisasi yang sekarang ini terjadi di seluruh penjuru benua, “memaksa” masyarakat internasional untuk segera mensikapinya agar mereka tidak tertinggal jauh dengan negara tetangganya. Oleh karenanya, bagi negara-negara berkembang dalam mengantisipasi peluang adanya globalisasi perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain: menciptakan kondisi yang nyaman bagi para investor yang akan menanamkan modalnya, menghilangkan rasa ketidakpastian usaha baik aturan hukumnya, perlakuan-perlakuan yang tidak menguntungkan bagi investor maupun negara itu sendiri, mengurangi kebijakan yang bersifat fluktuatif akibat intervensi pemerintah yang berlebihan, dan lain sebagainya.

Dengan kata lain, gejala globalisasi yang muncul saat ini sebenarnya juga peluang bagi bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia apabila mau menyeimbangkan kepentingan nasionalnya dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi investor untuk berinvestasi. Salah satunya dengan melakukan berbagai tindakan untuk mengusahakan bekerjanya kembali hukum pasar yang dijiwai oleh persaingan yang sehat, karena iklim

---

Pembangunan Indonesia, Jakarta; Cidesindo, 1985, halaman 20.

<sup>19</sup> Syahir, Meramal Ekonomi Ditengah Ketidakpastian, PT. Gramedia; Jakarta, 1995, hal 25

investasi yang tak pasti pada akhirnya akan menghambat berbagai proses relokasi<sup>20</sup>.

## **B. Pembangunan Ekonomi Indonesia**

### **B.1. Pengertian Pembangunan Ekonomi**

Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam GBHN adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Di bidang ekonomi, titik berat pembangunan adalah terciptanya perekonomian yang handal dan mandiri dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang makin merata, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang mantap.

Pembangunan ekonomi seperti yang telah kita ketahui bersama, pada hakekatnya adalah mengubah sumber daya potensial yang tersedia menjadi kekuatan riil dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi yang dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan nasional yang dicitakan, yaitu bukan saja masyarakat yang cukup sandang, papan dan pangan, tetapi harus diartikan secara bersama menentukan dan mewujudkan masa depan yang dicitakan<sup>21</sup>. Dengan demikian pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses, di mana perekonomian dijalankan untuk mencapai suatu gerakan ke atas atau transformasi seluruh sistem sosio-ekonominya termasuk didalamnya

---

<sup>20</sup> Loc.cit.

<sup>21</sup> Lebih rinci tentang pengertian pembangunan ekonomi, lihat Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Indonesia Tahun 1998

perbaikan-perbaikan kualitas sumber-sumber daya serta perubahan-perubahan positif pada sikapnya, lembaga-lembaga atau pranata dan nilai-nilainya<sup>22</sup>.

Dengan kata lain, pembangunan ekonomi adalah proses di mana *output* atau pendapatan nyata perkapita (*Gross National Product*), suatu perekonomian masyarakat meningkat dalam waktu lama. Dalam konteks ini, pembangunan ekonomi berarti pengolahan kekuatan ekonomi potensiil menjadi kekuatan ekonomi riil melalui investasi modal, penggunaan teknologi, ilmu pengetahuan, peningkatan ketrampilan, dan kemampuan berorganisasi serta manajemen yang baik dan benar. Oleh sebab itu dalam pelaksanaannya perlu upaya-upaya untuk meningkatkan, memperluas, memantapkan dan mengamankan pasar bagi segala produk baik barang maupun jasa, termasuk aspek investasi serta meningkatkan kemampuan daya saing terutama dalam perdagangan internasional.

Di sektor perdagangan khususnya perdagangan internasional dewasa ini perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Sebab isu perdagangan internasional yang berkembang di era sekarang ini tidak dapat dilepaskan dari pergerakan perekonomian dunia, yang berarti perdagangan internasional pada suatu bangsa sangat signifikan dengan kondisi dan situasi perdagangan global pada umumnya. Kondisi tersebut mau tidak mau akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan perekonomian yang ditetapkan oleh suatu bangsa khususnya terhadap perdagangan internasionalnya.

---

<sup>22</sup> Winardi, Pengantar Ekonomi Pembangunan, Bandung, 1983, halaman 6.



### **B.1.1 Pembangunan Ekonomi sebelum Era Pasar Bebas**

Pembangunan ekonomi di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan tahun 1945 banyak diwarnai kondisi politik negara pada saat itu. Belanda sebagai penjajah terakhir yang bercokol disini, banyak memberikan warna bagaimana kondisi perekonomian, yang tidak lain hanya untuk memenuhi kepentingan negaranya. Kurang lebih 50% perusahaan besar ada di tangan Belanda, dan bahkan pemerintah Indonesia sendiri tidak mempunyai perusahaan negara. Tahun 1966-1967 merupakan masa transisi kedua, dimana kondisi yang dihadapi demikian berat dibandingkan masa-masa sebelumnya. Praktis, perekonomian di Indonesia juga mengalami masa pasang surut karena selain masalah ekonomi juga terkait dengan masalah mentalitas pejabat pemerintah sebagai produk dari kondisi politik dalam negeri yang akhirnya berdampak pada kebocoran anggaran.

Kondisi perekonomian saat itu diperburuk dengan pemerintahan masa orde lama yang menempatkan politik sebagai panglima dan banyak membangun proyek ekonomi mercusuar yang kurang bermanfaat, dan akhirnya sekitar tahun 1966 terjadi inflasi yang tinggi dan perekonomian memburuk sampai masa pergantian pemerintahan baru (zaman orde baru) dengan sistem demokrasi ekonomi yang sekarang kita anut.

Dalam pemerintahan zaman orde baru, pembangunan sektor perekonomian menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan zaman sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya bangunan sarana dan

prasarana yang mendukung dari perekonomian Indonesia. Dengan memanfaatkan bantuan serta pinjaman dana dari luar negeri, pemerintah yang berkuasa pada saat itu mampu mengangkat derajat perekonomian bangsa di mata dunia. Hanya saja, kondisi ini tidak dapat berlangsung lama, sebab dalam perkembangannya hubungan antara negara donatur dan negara peminjam telah menumbuhkan ketergantungan yang tidak sehat dengan penuh diwarnai kepentingan-kepentingan yang berlainan, yang pada gilirannya banyak terjadi kepincangan dan kerumitan hubungan ekonomi internasional yang justru dikarenakan perbedaan pandang dasar-dasar ekonomi yang jadi landasan pembangunan.

Selain itu, banyak permasalahan intern muncul di negara-negara berkembang khususnya Indonesia, dalam menerapkan strategi pembangunannya yang tidak *fair* seperti proteksi yang berlebihan terhadap perusahaan yang sebenarnya tidak layak, pengucuran dana kepada beberapa kelompok pengusaha yang menjadi kroni-kroni penguasa dan tidak memiliki moral bisnis, dan lain sebagainya. Akibatnya, ketika gelombang globalisasi yang juga mengimbas pada sektor perdagangan sudah tidak tak terelakkan, segala bangunan dan sistem perekonomian yang tampaknya kuat tetapi sebenarnya keropos ini menjadi berantakan dan hancur tidak bermakna kembali.

### **B.1.2 Pembangunan Ekonomi dalam Era Pasar Bebas**

Salah satu perkembangan yang menonjol dan menjadi perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun terakhir ini serta

cenderung masih akan berlangsung di masa datang adalah makin meluasnya arus globalisasi baik di sektor sosial budaya, ekonomi dan perdagangan, serta sektor-sektor kehidupan lainnya. Di sektor perdagangan misalnya, karena pengaruh perkembangan teknologi, informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor ini meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Seiring dengan perubahan dan perkembangan perdagangan internasional, Indonesia pun telah terkooptasi dalam ekonomi global. Ini berakibat pada persaingan perdagangan luar negeri yang ketat antar negara, semata-mata untuk memenangkan persaingan dalam merebut pangsa pasar (*accses market*).

Pergerekan globalisasi tidak terkecuali di bidang perdagangan internasional diatas, telah menuntut setiap negara tidak terkecuali Indonesia merubah strategi perdagangan internasionalnya, dari yang bersifat tertutup menjadi terbuka, mengurangi dan menghapus kebijakan yang bersifat protektif serta menggeser kebijakan yang bergantung pada ekspor migas ke kebijakan yang didominasi dengan pengembangan ekspor non migas. Sifat terbuka diatas diartikan sebagai adanya peran besar yang dimainkan oleh sektor atau bidang terkait, baik langsung maupun tidak langsung, dengan masyarakat atau perekonomian negara lain. Hubungan tersebut terjadi di beberapa aktifitas seperti ekspor-impor, pinjam-meminjam, pasar modal dan lain sebagainya. Implikasi dari keterbukaan ini adalah pekanya

perkembangan perekonomian Indonesia terhadap perkembangan yang terjadi di negara-negara lain, terutama negara-negara yang menjadi mitra dagang atau mitra hubungan ekonomi serta negara-negara maju yang pengaruhnya sangat menentukan dalam hubungan perdagangan moneter.<sup>23</sup>

## **B.2. Kebijakan Makro Ekonomi**

Setiap negara menginginkan kondisi perekonomiannya stabil tanpa adanya gejolak yang dapat menimbulkan inflasi. Bahkan seluruh kegiatan perekonomian diarahkan agar dapat meningkatkan pendapatan nasionalnya sehingga pada gilirannya dapat pula meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Oleh karenanya masing-masing negara berupaya sedemikian rupa dalam penentuan kebijakan pembangunan dan ini erat sekali hubungannya dengan permasalahan sekitar perekonomian. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan sebagai upaya-upaya yang perlu diambil untuk menanggulangi suatu permasalahan ekonomi tertentu. Hal inilah yang dalam ekonomi makro sebagai salah satu cabang dari ilmu ekonomi dikenal dengan kebijaksanaan makro.

Pada prinsipnya, kebijakan makro ekonomi mencakup masalah-masalah yang berkait erat dengan pengelolaan dan pengendalian perekonomian. Pengendalian umum perekonomian tersebut mengusahakan agar perekonomian bisa bekerja dan tumbuh secara seimbang, terhindar dari

---

<sup>23</sup> Soedradjad D., Perdagangan dan Pembangunan; Tantangan, Peluang dan Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Indonesia, Jakarta; PT. Pustaka LP3ES, 1992, hal; 26

keadaan yang bisa mengganggu keseimbangan. Secara garis besar, permasalahan kebijaksanaan makro mencakup dua hal <sup>24</sup>:

- a. Masalah jangka Pendek atau masalah stabilisasi, yaitu masalah yang berkait dengan bagaimana menyetir perekonomian dalam waktu yang relatif pendek agar terhindar dari penyakit makro yaitu inflasi, pengangguran dan ketimpangan neraca pembayaran.
- b. Masalah jangka panjang atau masalah pertumbuhan, yaitu mengenai bagaimana menyetir perekonomian agar ada keserasian antara pertumbuhan penduduk, penambahan kapasitas produksi dan tersedianya dana untuk investasi.

---

<sup>24</sup> Boediono, Ekonomi makro, Edisi 4, Yogyakarta: BPFE, 1982, hal 1.

### **BAB III**

## **HUBUNGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DENGAN PEMBANGUNAN EKONOMI**

### **A. Tinjauan Umum Perdagangan Internasional**

#### **A.1. Perkembangan Perdagangan Internasional**

Studi tentang perdagangan mulai muncul pada abad 16 –17, pada zaman merkantilisme, sebagai suatu rangkaian argumen bagaimana negara itu berdagang. Mereka pada saat itu berpendapat bahwa kepentingan masing-masing negara hanya paling baik dilayani dengan meningkatkan ekspor dan mengurangi import. Setelah abad 18, pendapat seperti itu bergeser pada masalah perdagangan bebas, yaitu cara paling baik melayani kepentingan nasional dan juga kepentingan seluruh dunia adalah dengan membiarkan setiap orang atau negara bebas memilih perdagangan yang paling cocok.

Perdagangan menurut teorinya Adam Smith, dianggap sebagai hasil interaksi antara permintaan dan penawaran yang terus menerus bersaing. Perdagangan internasional dianggap sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan bersama seluruh masyarakat di dunia<sup>25</sup>

Pada tahun 1990-an, dunia ditandai dengan bisnis perdagangan antar blok blok perdagangan raksasa yang menjadi ide dari gagasan awal untuk diadakan perdagangan bebas. Sejarah mencatat bahwa dalam masyarakat dunia ada kecenderungan untuk membangun suatu masyarakat ekonomi tunggal, baik dalam masyarakat Eropa Barat maupun Amerika

Utara. Bersama dengan Jepang, mereka menghasilkan tidak kurang dari 70% produk yang dibutuhkan oleh dunia, dimana hal ini akan menjadi kendala bagi negara-negara di kawasan Asia Timur dan Dunia ke III.

Demikian halnya yang terjadi di Eropa Barat, dimana sejak berakhirnya perang dunia ke II mereka mencoba untuk mengintegrasikan ekonomi mereka bersama yang tergabung dalam MEE (1957), berdasarkan *Treaty of Rome*. Mereka menghapus setiap tarif perdagangan yang berlaku di antara mereka dan pada tahun 1986 ditandatanganinya *Single European Act*. Melalui perjanjian itu diatur tentang praktek bisnis, sistem kerja, standard keselamatan kerja dan keuangan, sehingga akan menjadi bagian dari kebijaksanaan yang diatur secara seragam oleh MEE dan tidak membedakan kebijaksanaan yang berlaku di 12 negara anggotanya.

Kemudian perdagangan internasional secara umum berkembang ke arah perdagangan yang lebih bebas dan terbuka tidak berdasarkan regionalitas semata. Negara-negara baik secara bilateral maupun secara global cenderung melakukan kerjasama perdagangan dalam bentuk perdagangan barang (*goods*), jasa (*service*), maupun penurunan atau bahkan penghapusan bentuk-bentuk hambatan perdagangan baik yang bersifat tarif atau non-tarif untuk menciptakan suatu mekanisme perdagangan yang lebih kondusif dan progresif. Mereka mulai menyadari dan memahami semakin pentingnya arti pasar bebas, serta implikasi dari pasar bebas seperti mekanisme perdagangannya.

---

<sup>25</sup> Peter H. Lindert, *Ekonomi Internasional*, Edisi ke 9, Jakarta: Bumi Aksara, 1994, hal 10

Kehadiran forum kerjasama perdagangan seperti AFTA, APEC dan bahkan GATT serta WTO sebagai ketentuan dan forum penyelesaian perselisihan perdagangan yang bersifat internasional, mengakibatkan perdagangan dunia terdorong ke arah perdagangan yang lebih bebas dan terbuka. Sistem perdagangan melalui bentuk itu mengupayakan mekanisme yang bebas dari praktek bisnis curang (*unfair business practices*) seperti proteksi melalui tarif dan non tarif, sehingga dapat berkembang dalam iklim yang lebih fair.<sup>26</sup>

#### A.2. Keunggulan Komparatif dan Keunggulan Absolut

Pada dasarnya setiap negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh sebab itu mereka melakukan perdagangan internasional untuk saling mengekspor dan mengimport kebutuhannya. Dalam ekspor khususnya, selain untuk mencukupi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi, dimaksudkan juga untuk memperoleh keuntungan berupa peningkatan devisa maupun untuk menyeimbangkan neraca pembayarannya. Berkaitan dengan kepentingan tersebut, masing-masing negara akan memperoleh keuntungan dalam perdagangan jika mengetahui keunggulan mutlak serta keunggulan komparatif yang dimilikinya.

Dalam teori perdagangan internasional dikenal dua prinsip yaitu *comparative advantage* dan *absolute advantage* yang dikemukakan oleh mazhab klasik. Sekalipun beberapa sarjana mengkritik bahwa dalam hal

---

<sup>26</sup> Ida Bagus Wyasa Putra, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2000, hal.4



tertentu teori klasik tentang perdagangan internasional mempunyai kelemahan yaitu:<sup>27</sup>

- a. Dalam perdagangan internasional, orang lebih berfikir pada perbedaan harga absolut, bukan pada perbedaan relative dari ongkos produksi.
- b. Dalam praktek, tidak selalu terjadi perdagangan antar dua negara dengan hanya dua jenis barang yang diperdagangkan.
- c. Pada kenyataannya, ongkos transport yang diabaikan oleh teori klasik, malah besar peranannya dalam penentuan harga dalam perdagangan internasional
- d. Asumsi penambahan atau pengurangan produksi yang tidak mempengaruhi biaya per unitnya (*constant cost*), ternyata dalam praktek ongkos rata-rata tersebut dapat naik atau turun.

Pelopor teori klasik adalah Adam Smith yang mendasarkan teorinya atas *Labour Theory of value*, yang menyatakan bahwa perdagangan internasional terjadi karena adanya perbedaan biaya produksi, dan barang-barang yang diperjualbelikan berdasarkan perbandingan biaya produksinya. Biaya produksi yang dimaksud adalah banyaknya tenaga yang dikorbankan untuk memproduksi barang-barang tersebut<sup>28</sup>.

Pendapat Adam Smith ini kemudian disempurnakan oleh David Ricardo dengan teorinya yang terkenal sampai saat ini yaitu *comparative advantage*<sup>29</sup> yang berdasarkan pada *comparative cost*. Menurutny, negara-negara yang melakukan perdagangan internasional akan memperoleh keuntungan apabila barang yang diperdagangkan diproduksi dengan tenaga

---

<sup>27</sup> Dochak Latief, *Ekonomi Internasional, Teori, Problematika dan Kebijaksanaanya*, Yogyakarta. Yayasan Penerbitan FKIS – IKIP, 1979. hal 57-58.

<sup>28</sup> *Ibid*, hal 51

<sup>29</sup> Menurut beberapa sumber, yang pertama menerangkan teori ini adalah Torens, namun kemudian di populerkan oleh Ricardo (Lihat Dochak latief, hal 51 - 53)

yang relatif lebih sedikit dari negara lain. Kenyataannya, Ricardo masih mendasarkan teorinya pada upah pekerja atau dikenal *labour theory* sekalipun disadarinya bahwa banyak faktor yang tergabung dalam ongkos produksi. Kemudian teori ini mengalami perubahan dan perbaikan oleh beberapa sarjana ekonomi, namun kenyataannya teori yang dikatakan modern pun sebenarnya merupakan pengembangan dari teori klasik<sup>30</sup>.

Adalah Nassau Senior (1830) yang memperkenalkan komponen upah uang dalam teori perdagangan internasional. Menurutny, perbedaan upah yang diberikan oleh perusahaan ekspor berhubungan dengan produktifitas dan keahlian pekerja dan bukan karena jenis pekerjaan, kepadatan penduduk, taraf hidup dan lain sebagainya yang pada gilirannya juga akan mempengaruhi upah buruh pada lapangan kerja yang lain. Sarjana lain yang sependapat dengan Nassau yaitu Cairnes (1870), sarjana Inggris yang menyatakan bahwa tinggi rendahnya upah tidak lagi sebanding dengan lamanya buruh bekerja di perusahaan eksport. Sedangkan John Stuart Mill lebih menekankan pengaruh upah terhadap struktur perdagangan internasional. Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Taussig struktur perdagangan internasional lebih dipengaruhi oleh *capital cost* yaitu perbedaan tingkat suku bunga yang ada daripada atas dasar lamanya kerja.

Selain teori *comparative cost* yang disampaikan diatas, menurut Haberler dalam perdagangan internasional juga dikenal *Reciprocal supply-demand curve theory* yang dikemukakan Alfred Marshall, yang menerangkan

---

<sup>30</sup> Dochak Latief, *Ibid*, hal 49

lebih tinggi. Azas pertama tersebut lebih menekankan pada masalah biaya produksi, tingkat produktifitas dan efisiensi dari komoditi itu.

Azas kedua dipandang dari sudut konsumen, sehingga komoditi yang mempunyai potensi ekspor adalah komoditi yang mutu, desain, ketepatan waktu penyerahan, maupun pengepakan yang memenuhi selera konsumen. Azas ketiga dilakukan apabila kondisi cadangan komoditi tertentu menipis, sehingga perlu mengekspor komoditi tersebut yang bermutu baik dan dalam waktu yang bersamaan mengimpor komoditi yang sama tetapi lebih rendah mutunya dalam jumlah yang setara dengan yang diekspor, sehingga dapat memenuhi cadangan dari komoditi yang menipis tersebut. Ketiga azas tersebut merupakan azas utama dalam menentukan kebijakan yang mendorong ekspor maupun import.<sup>33</sup> Demikianlah bahwa teori-teori yang disampaikan tersebut bersifat melengkapi dan mengembangkan dari teori klasik.

### **A.3. Persaingan Bebas dalam Perdagangan Internasional**

Perdagangan internasional yang secara sederhana diartikan sebagai pertukaran barang dan atau jasa antara suatu negara dengan negara lain (termasuk orang atau badan hukum di dalamnya), sementara ini diyakini para pelaku bisnis telah berkembang dengan pesat sejak Perang Dunia II dan merupakan bagian yang makin penting dari kegiatan perekonomian dunia saat ini. Pada awalnya, praktek ini dilakukan antar negara (dengan pemerintah sebagai pelakunya) atau *government to government* yang bersifat bilateral,

kemudian berkembang dengan melibatkan beberapa negara yang bersifat multilateral.

Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, swasta mempunyai peran yang tidak bisa dinafikan begitu saja, khususnya dalam bidang perdagangan. Dalam posisi yang hampir sejajar sebagai subjek hukum<sup>34</sup> dimata masyarakat internasional, swasta pun dapat melakukan kegiatan perdagangan yang melintasi batas nasional suatu negara, baik itu dilakukan antara swasta dengan swasta (*privat to privat*) maupun swasta dengan pemerintah negara lain (*privat to government*).

Dalam perkembangan dunia perdagangan yang semakin maju dan kompleks ini, saling ketergantungan internasional juga semakin kuat, termasuk hubungan antara perusahaan-perusahaan bisnis serta hubungan antara perusahaan dengan masyarakat dan pasar dunia. Hal ini terlihat dimana para pengusaha di negara maju dewasa ini sangat merasakan adanya tantangan dari barang import yang justru datangny dari negara berkembang.

Perdagangan internasional yang melibatkan dua atau beberapa negara telah berdampak pada persaingan dagang yang makin ketat sehingga masing-masing negara bersaing untuk mengedepankan keunggulan-keunggulan komoditi eksportnya. Komoditi ekspor Indonesia sesungguhnya mempunyai keunggulan hampir mutlak, karena hanya diproduksi oleh beberapa negara saja. Ini dikarenakan kedudukan kita yang secara geografis mempunyai banyak keuntungan.

---

<sup>33</sup> Amir MS, Eksport – Import, Teori dan Penerapannya, Ikrar Mandiri Abadi, Jakarta; 1993; hal15

Ironisnya, dalam persaingan bisnis internasional, Indonesia belum bisa menikmati dan memenangkan persaingan karena adanya beberapa kelemahan dan juga karena perilaku konsumen dunia. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain :<sup>35</sup>

- a. Kebutuhan devisa yang mendesak di negara produsen
- b. Perilaku konsumen yang mematahkan monopoli produsen
- c. Taktik konsumen yang memainkan harga komoditi ekspor
- d. Perang harga sesama produsen

Selain itu dalam persaingan perdagangan internasional, sekurang-kurangnya terdapat 4 hal yang mempengaruhi, yaitu<sup>36</sup>

- a. Daya saing sesama negara produsen. Ini berkisar pada masalah kemampuan pemasaran, tingkat efisiensi dan mutu komoditi.
- b. Perilaku, taktik dan tehnik dagang yang dijalankan oleh konsumen untuk mendapatkan komoditi dengan harga murah dan mutu tinggi.
- c. Campur tangan pemerintah yang dilakukan oleh negara konsumen dan produsen yang saling bersifat proteksionistis
- d. Kemajuan teknologi, dimana negara-negara konsumen sanggup membuat barang pengganti maupun teknologi dalam teknik produksi yang berpengaruh pada biaya produksi di negara produsen pesaing.

---

<sup>34</sup> Beberapa literatur telah menyebutkan bahwa Multi National Corporation (MNC) telah dianggap sebagai subyek hukum baru di bidang hukum internasional.

<sup>35</sup> Amir MS, *Op.cit*, hal 118

## **B. Keterkaitan Pembangunan Ekonomi dan Perdagangan Internasional**

### **B.1. Kepentingan Nasional dalam Perdagangan Internasional**

Pemerintah berbagai negara sejak jaman dahulu umumnya turut campur tangan secara intensif dalam perdagangan internasional. Dalam konteks tersebut tidak lepas dari politik perdagangan internasional yang dilakukannya. Politik ini sejak lama merupakan masalah perbedaan pendapat. Disatu pihak terdapat golongan yang pro perniagaan bebas atau non intervensi pemerintah. Sedangkan di pihak lain terdapat golongan yang pro intervensi pemerintah dalam perdagangan internasional, yang biasanya dimaknai sebagai kebijakan “penghambat impor”.

Politik perdagangan internasional yang dimaksud dapat diartikan secara luas dan sempit. Secara luas, meliputi segala macam kegiatan pemerintah suatu negara yang melahirkan secara langsung atau tidak langsung mengenai komposisi, arah, dan aliran-aliran serta faktor-faktor yang penting dalam hubungan ekonomi dalam negerinya. Sedangkan dalam arti sempit adalah segala aktifitas pemerintah yang dimaksudkan untuk mengatur, membatasi, mempengaruhi dan menuntun perdagangan internasional dan investasi.<sup>36</sup> Meskipun demikian, tidak ada kebijakan pemerintah yang secara *eksklusive* dimaksudkan hanya untuk kebijakan ekonomi dalam negeri atau pelaksanaan politik luar negerinya saja. Sebab bagaimanapun juga kegiatan ekonomi yang dilakukan pemerintah tersebut akan saling bergantung dan mempengaruhi satu dengan yang lain (*mutual interdependency*) terhadap

---

<sup>36</sup> Amir MS, *Ibid*, hal 23

kehidupan ekonomi masyarakat baik itu statusnya sebagai konsumen atau produsen.

Berkaitan dengan persoalan tersebut, perlu dibedakan antara kepentingan negara dan kepentingan internasional, dan oleh sebab itu masalah politik perdagangan pertama-tama harus dipandang dari sudut kepentingan nasional. Faktor-faktor yang dimaksud biasanya berkisar sekitar persoalan peran pemerintah disamping kemakmuran yang setinggi mungkin dalam bentuk penyediaan barang-barang secara maksimal, juga menghendaki tujuan dan kepentingan yang lain. Adapun tujuan dari politik ekonomi tersebut antara lain: *autarki* atau *self sufficiency*, peningkatan ekonomi, perlindungan/proteksi, stabilitas kesempatan kerja, keseimbangan neraca pembayaran dan mempercepat pembangunan ekonomi.<sup>38</sup>

## **B.2. Kebijakan Perdagangan Internasional dalam era Globalisasi**

Kebijakan perdagangan internasional merupakan bagian dari kebijakan ekonomi makro suatu negara, sehingga sifatnya tidak mandiri namun berinteraksi dengan komponen-komponen lain seperti kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan investasi dan sebagainya. Secara definitif kebijakan perdagangan internasional diartikan sebagai tindakan/tindakan atau peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah untuk mempengaruhi struktur/komposisi dan arah transaksi perdagangan dan

---

<sup>37</sup> Dochak Latief, Op.cit, hal 112.

<sup>38</sup> Ibid, hal 113. Bandingkan F.Hartog, Politik Ekonomi, Bandung; Tarsito; 1990, hal 73 - 78

pembayaran internasional<sup>39</sup>. Kebijakan diartikan sebagai upaya dari pemerintah untuk menstimulant, mengatur, membatasi, mengarahkan dan menentukan perdagangan internasional atau investasi lain yang terjadi di suatu negara dengan negara lain<sup>40</sup>.

Kebijakan negara dalam perdagangan internasional erat berkait dengan politik internasional, sebab kebijakan ekonomi luar negeri suatu negara hanyalah sebagian kecil dari kebijakan ekonomi negara secara keseluruhan. Hanya saja, pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan landasan pengambilan kebijakan luar negeri tidak semata-mata berdasarkan kepentingan ekonomis saja, tetapi pertimbangan lain yang bersifat non ekonomis seperti politik, misalnya. Lebih jauh dari itu, segala kebijakan ekonomi baik dalam negeri maupun luar negeri dilandasi oleh sistem ekonomi yang dianutnya.

Secara garis besar kebijakan perdagangan internasional besar mempunyai tujuan<sup>41</sup> :

- a. *National economic stability argument*, yaitu untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional dari pengaruh buruk dari luar, misalnya dampak dari pertumbuhan inflasi di luar negeri (mitra dagang khususnya) terhadap tingkat inflasi di dalam negeri.
- b. *Infant industry argument*, yaitu melindungi industri nasional dari persaingan atas barang-barang impor

---

<sup>39</sup> TH.Tulus Tambunan, *Kinerja Ekspor Manufaktur Indonesia*, Jakarta; Kompartemen Industri Logam dasar &Mesin dan LP3E, 2001, hal 169

<sup>40</sup> Dochak, Op.cit, hal 110.

<sup>41</sup> TH. Tambunan, Op.cit, hal 170



- c. *Balance payment argument*, yaitu untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran sekaligus menjamin persediaan cadangan valuta asing yang cukup, khususnya pembayaran impor dan membayar hutang luar negeri
- d. *Economic growth argument*, menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil
- e. *Employment creation argument*, yaitu melindungi dan meningkatkan lapangan kerja

Sesuai dengan tujuan serta sasaran yang hendak dicapai, kebijakan tersebut dapat dikelompokkan dalam dua kategori yaitu pertama kebijakan pengembangan atau promosi ekspor dan kedua kebijakan pembatasan impor.

#### **B.2.1. Kebijakan Pengembangan Ekspor**

Kebijakan pemerintah dalam konteks ini adalah segala tindakan termasuk pembuatan peraturan & dispensasi perlakuan terhadap para eksportir, dimana semua itu bertujuan untuk meningkatkan perkembangan ekspor. Sesuai dengan tujuannya, kebijakan ini dilakukan melalui pembebasan, pengurangan, penangguhan atau pembebasan pajak ekspor, penyediaan fasilitas kredit perbankan, penyederhanaan tatalaksana ekspor, pemberian subsidi ekspor, pembentukan asosiasi eksportir, membangun promosi dan sekaligus pusat informasi di luar dan dalam negeri serta dapat memanfaatkan kemudahan yang ditawarkan oleh beberapa kelompok negara maju misalnya *General System of Preferency (GSP)*.

Dengan kebijakan tersebut pemerintah di negara itu berkepentingan untuk merangsang pertumbuhan serta peningkatan ekspor sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya karena peningkatan pendapatan dan devisa negara. Meskipun demikian beberapa kondisi berikut patut diperhatikan apabila semata-mata mengejar ekspor, karena justru sebaliknya membawa kerugian dalam pertumbuhan ekspor, yaitu apabila<sup>42</sup>:

- a. Pertumbuhan negara telah dilakukan semata-mata ke sektor ekspor
- b. Permintaan luar negeri untuk ekspor negara tersebut merupakan harga yang tidak elastis sehingga suatu ekspansi dalam permintaan ekspor dapat menghantar pada penurunan harga dalam jumlah yang besar
- c. Negara tidak dapat mengimbangi kemampuan untuk menyediakan barang lebih banyak.

#### **B.2.2. Kebijakan Pembatasan Import**

Kebijakan pembatasan impor mempunyai tujuan untuk melindungi industri domestik dari persaingan barang-barang impor. Oleh karenanya sesuai dengan tujuannya, kebijakan ini juga dikenal dengan kebijakan proteksi yang dilakukan melalui pengenaan tarif (*tariff*) dan pembatasan-pembatasan yang bukan tarif (*non-tariff barriers*) berupa tindakan-tindakan atau ketentuan-ketentuan administrasi dan standarisasi bagi produk-produk impor. Jadi hambatan non tariff ini merupakan bentuk tindakan atau kebijakan dan praktek pemerintah yang menghambat volume, komposisi, arah

---

<sup>42</sup> Peter H.Lindert, Op.cit hal 17

perdagangan barang ke konsumen disuatu negara yang bukan dalam bentuk pajak.

Tentang kebijakan ini, beberapa sarjana belum ada kesepakatan pendapat. Maksudnya bahwa banyak teori yang mendukung kebijakan impor terutama negara-negara berkembang seperti Indonesia, sebaliknya juga tidak sedikit pendapat yang menentang kebijakan impor karena sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip perdagangan bebas. Perdagangan internasional menurut mereka yang menentang kebijakan impor, merupakan perdagangan tanpa proteksi yaitu perdagangan yang didasarkan atas keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif sehingga memaksimalkan *output* dan menguntungkan bagi eksportir maupun importir.

Sebaliknya, kelompok negara yang mendukung kebijakan pembatasan impor beranggapan bahwa kebijakan proteksi tetap diperlukan dengan alasan untuk:<sup>43</sup>

- a. Menjaga stabilitas dan keamanan nasional, yaitu dengan menghambat serta melarang produk impor yang dapat mematikan industri strategis nasional serta memberi pengaruh negatif bagi masyarakat
- b. Melindungi bagi industri yang baru berdiri (*infant industri*) serta memperkuat diri sampai industri itu siap menghadapi persaingan dari luar dengan kekuatan sendiri
- c. Meningkatkan diservikasi produk atau industri dalam negeri

---

<sup>43</sup> Dochak Latief, Op.cit, hal 172.

Demikianlah bahwa proteksi dimaksudkan sebagai upaya pemerintah untuk melakukan perlindungan pada industri domestik terhadap barang impor dalam jangka waktu tertentu. Proteksi bertujuan untuk mengecilkan kelangsungan industri yang berlaku dalam perdagangan. Jadi umumnya proteksi mengarah pada tindakan yang menguntungkan produksi dalam negeri terhadap persaingan produk impor dipasaran dalam negeri.

## **BAB IV**

### **DUMPING**

#### **A. GATT 1994 sebagai Aturan Hukum dalam Perdagangan Internasional**

##### **A.1. Perkembangan GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*)**

Keinginan adanya suatu organisasi perdagangan multilateral yang dapat berfungsi penuh dalam melaksanakan hubungan perdagangan antar negara pada dasarnya bukanlah hal yang baru. Di tahun 1947 berlangsung perundingan perdagangan di Geneva, yang berhasil merancang dan menandatangani Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan atau dikenal dengan GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) sebagai suatu instrumen yang bersifat sementara bagi pertukaran konsesi atau penurunan tarif dan tindakan-tindakan dalam perdagangan barang sesama negara-negara peserta<sup>44</sup>.

Melalui persetujuan ini mengupayakan liberalisasi ekonomi yang *non diskriptif* dan *reciprocal* antara negara-negara peserta. Perundingan yang menghasilkan GATT 1947 dinilai cukup berhasil, terutama masalah penurunan tarif untuk perdagangan barang-barang tertentu antar negara. Sehingga GATT yang bersifat sementara kemudian berubah menjadi instrumen perdagangan internasional yang bersifat tetap.

Sampai dengan Putaran Tokyo yaitu sekitar tahun 1973 - 1979 masalah penurunan tarif terhadap perdagangan barang-barang tertentu masih diberlakukan dan bahkan berhasil mencapai keputusan di bidang tarif. Namun

keberhasilan ini tidak diimbangi dengan penurunan hambatan-hambatan non-tarif (*non tariffs barrier*). Bahkan hambatan-hambatan non tarif makin merajalela sebagai bentuk proteksi beberapa negara terhadap industri domestik seperti misalnya; kebijakan politik dumping, pembatasan kuota impor, penentuan kuota tarif yang tinggi dan lainnya. Dengan kondisi yang demikian ini mengakibatkan terjadinya gejala proteksi yang menghambat lalu-lintas perdagangan internasional, sehingga tujuan dibentuknya aturan perdagangan barang antar negara yang telah disepakati dalam GATT 1947 tidaklah tercapai.

Atas dasar pertimbangan itu, negara-negara industri seperti Amerika dan Jepang, memelopori segera dirampungkan-nya putaran perundingan perdagangan multilateral yang sudah dimulai sejak deklarasi Punta Del Este September 1986. Akhirnya negara-negara anggota menyetujui hasil-hasil perundingan pada tanggal 15 Desember 1993 di Jenewa, dan kemudian di Marrakesh disahkannya sebagai *Final Act* pada tanggal 15 April 1994 sebagai hasil akhir dari Putaran Uruguay.

Tiga hal pokok yang dapat dicapai dari Putaran Uruguay adalah *Pertama*, membuka akses yang lebih besar dalam perdagangan multilateral, *Kedua*, menuntut adanya harmonisasi standar dalam perdagangan dan pengaturan persaingan yang sehat. Tuntutan ini tercermin dari adanya asas baru dalam Putaran Uruguay yakni asas "*Fair Trade*", dimana persaingan di pasar dunia didasarkan pada basis yang sama (*the same level playing fields*),

---

<sup>44</sup> GATT, Deperindag, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Jakarta, 1991, halaman 1.

*Ketiga* membentuk badan penyelesaian sengketa bidang perdagangan internasional atau WTO (*World Trade Organization*), untuk menginterpretasikan hasil putaran uruguay sekaligus mengawasi dan menjatuhkan sanksi pada tiap pelanggarannya.<sup>45</sup>

Dampak penting Putaran Uruguay yang paling pokok adalah suatu perdagangan multilateral yang lebih efisien serta dapat memberi perubahan dan penyesuaian yang dinamis melalui persaingan yang sehat. Dengan demikian pada dasarnya, setiap negara memperoleh keuntungan dari *market access* melalui dinamika perekonomian sesuai dengan kesempatan pasar internasional yang terbuka dan transparan.

Kesempatan dari *market access* berupa penurunan tarif, (mengganti *non tariff barrier* dengan tarif), klarifikasi dalam aturan anti dumping, dan efisiensi dalam *dispute settlement* (penyelesaian sengketa). Jadi secara keseluruhan ini merupakan puncak keberhasilan GATT (*General Agreement on tariff and Trade*) dalam upaya menata perdagangan multilateral ke arah yang lebih efisien.<sup>46</sup>

Berbeda dengan GATT 1947 yang hanya mengatur tentang perdagangan barang saja, dalam GATT 1994 ini selain perdagangan barang juga diatur tentang jasa-jasa dan hak milik intelektual sebagai komoditi perdagangan. Sehingga sifat dari GATT 1994 bukan lagi *sebagai code of*

---

<sup>45</sup> Anwar Nasution, *Daya Saing Indonesia dalam Perdagangan Jasa-Jasa Keuangan Paska Putaran Uruguay*, makalah Seminar "Benang Merah GATT", Sekolah Tinggi Manajemen Prasetya Mulya, Jakarta, 1994

<sup>46</sup> Bachrun S. Harzhap, *Peluang dan Tantangan Indonesia dalam Memanfaatkan Keputusan Putaran Uruguay dalam Market Access dan Tariffication*, Makalah Seminar "Benang Merah GATT", Sekolah Tinggi Prasetya Mulya, Jakarta, 1994.

*conduct* seperti peraturan dagang sebelumnya, tetapi sudah menjadi aturan hukum dalam perdagangan internasional dimana negara-negara peserta wajib mentaatinya.

Bagi negara-negara yang sudah menandatangani WTO (*World Trade Organization*), mereka harus mentaati GATT 1994 beserta perjanjian-perjanjian perdagangan yang ada dalam pengelolaan WTO sebagai aturan hukum dalam perdagangan internasional. Bentuk pentaatannya dapat berupa harmonisasi peraturan perdagangan nasional di negaranya dan tidak boleh melanggar azas-azas dalam perdagangan internasional. GATT 1994 sebagai perangkat hukum yang mengatur sistem perdagangan internasional telah menetapkan beberapa prinsip-prinsip dasar yaitu: *Trade Without Discrimination, Protection Through Tariffs, A Stable Basis for Trade, National Treatment*.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Dumping**

### **B.1. Pengertian Dumping**

Dalam hasil-hasil Perundingan Uruguay, ketentuan dumping diatur dalam Annex 1A: *Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994* yang menjadi bagian integral dan tidak terpisahkan dari persetujuan umum tentang perdagangan GATT 1994 (*General Agreement on Tariffs and Trade*), dan oleh karenanya harus ditaati oleh semua negara anggota yang telah meratifikasinya.

Pengertian dumping diatur dalam Pasal 2 Paragraf 2.1. yaitu:

*"For the purpose of this agreement, a product is to be considered as being*



*dumped, i.e. introduced into the commerce of another country at less than its normal value.*<sup>47</sup> Terjemahan bebas dari arti tersebut adalah untuk tujuan dari persetujuan ini, suatu produk dianggap sebagai dumping, misalnya diperkenalkan (dijual) dalam perdagangan di negara lain yang kurang dari nilai normalnya<sup>48</sup>.

Pengertian dumping menurut kamus ekonomi diartikan sebagai praktek dagang yang dilakukan eksportir dengan menjual komoditi di pasaran internasional dengan harga kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah daripada harga barang tersebut di negerinya sendiri atau daripada harga jual kepada negara lain; pada umumnya, praktik ini dinilai tidak adil karena dapat merusak pasaran dan merugikan produsen pesaing di negara pengimpor<sup>49</sup>. Jadi, secara singkat dapat dikatakan bahwa barang dumping adalah barang yang diimpor dengan tingkat harga ekspor yang lebih rendah dari nilai normalnya di negara pengekspor<sup>50</sup>.

Nilai normal (*normal value*) yang dimaksud dalam pengertian tersebut adalah "*Comparable price (of the like product) actually paid or payable in the ordinary course of trade for the like products intended for consumption in the exporting country or country of origin*" atau harga yang

---

<sup>47</sup> Lihat Uruguay Round, Final Act, Departemen Perdagangan, Jakarta 1994, halaman 145.

<sup>48</sup> Lihat Persetujuan Akhir, Putaran Uruguay, Terjemahan Resmi Bidang Perdagangan Multilateral, Departemen Perdagangan, Jakarta, 1994.

<sup>49</sup> Elly Erawaty, dan J.S. Badudu, Kamus Hukum Ekonomi, Jakarta, Komponen Pengembangan Hukum Ekonomi Proyek Elips, 1996, halaman 39.

<sup>50</sup> Lihat Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan.

sebenarnya dibayar atau akan dibayar terhadap produk sejenis untuk tujuan konsumsi dalam perdagangan umumnya di negara pengekspor.

Sedangkan yang dimaksud dengan harga ekspor adalah "*the price actually paid or payable for the product sold for export to the community net a.o. all taxes discounts and rebates actually granted and directly related*"<sup>51</sup>, yang secara bebas diterjemahkan sebagai harga yang seharusnya dibayar atau seharusnya akan dibayar termasuk pajak-pajak, potongan-potongan harga untuk barang sejenis yang diekspor ke negara pengimpor.

## **B.2. Ketentuan Hukum Tentang Dumping**

### **B.2.1. Ketentuan Dumping menurut GATT 1994**

Dalam putaran perdagangan internasional ke VI, *Kennedy Round* (1963-1967) telah berhasil menyusun ketentuan dumping yang pertama kali yang dikenal dengan "*Anti Dumping Code*" dan diberlakukan mulai tanggal 1 Juli 1968. Kemudian ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam *Tokyo Round* (1973-1979) sekaligus berhasil disahkan menetapkan persetujuan tentang "*Agreement on Interpretation of Articles VI, XVI and XXIII of GATT*" yang kemudian dikenal sebagai "*Code on Subsidies and Countervailing Measures*". Ketentuan tersebut masih bersifat "code", maka hanya menjadi petunjuk atau etika sehingga belum mempunyai kekuatan layaknya seperti ketentuan hukum.

---

<sup>51</sup> Dakwaan Anti Dumping-ME terhadap Produk Ekspor Indonesia, Dep. Perdagangan, 1993 hal.11

Dalam Putaran terakhir, *Uruguay Round* (1986-1994), masalah dumping tetap menjadi perhatian para *contracting parties*. Sehingga ketentuan dumping yang sudah ditetapkan dalam dua putaran perdagangan sebelumnya ditegaskan lagi dalam Annex 1A: *Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994* sebagai lampiran perjanjian yang tidak terpisahkan dari GATT 1994. Ketentuan dumping terdiri dari III Bagian dengan 2 Lampiran Penjelasan. Bagian I berisi Pasal 1 sampai dengan Pasal 15, Bagian II terdiri dari Pasal 16 dan 17, dan Bagian III hanya ada satu yaitu Pasal 18.

Berbeda dengan 2 putaran perundingan perdagangan diatas persetujuan-persetujuan perdagangan dalam pengelolaan WTO / hasil dari *Uruguay Round* tidak lagi sebagai “code” tetapi sudah menjadi “rule” atau aturan hukum dalam sistem perdagangan internasional yang bersifat mengikat dan harus ditaati oleh anggotanya (*member*).

#### **B.2.2. Ketentuan Dumping dalam Hukum Nasional Indonesia**

Dalam hukum nasional Indonesia, ketentuan dumping secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 beserta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan merupakan perubahan dari ketentuan perundang-undangan tentang bea dan cukai. Sebelumnya, terhadap kepabeanan berlaku ketentuan perundang-undangan dari zaman kolonial yaitu.<sup>52</sup>

- a. Indische Tarief Wet Staatsblad tahun 1973 Nomor 35 sebagaimana diubah dan ditambah,
- b. Rechten Ordonantie Staatsblad Tahun 1882 Nomor 240 sebagaimana telah diubah dan ditambah;
- c. Tarief Ordonantie Staatsblad Tahun 1910 Nomor 628 sebagaimana telah diubah dan ditambah;

Perubahan dari beberapa ketentuan kepabeanan tersebut menjadi Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan merupakan tuntutan dari perkembangan dalam pelaksanaan pembangunan bidang perekonomian, khususnya penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional yang banyak dipengaruhi oleh pergerakan globalisasi.

Dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan warisan kolonial, dalam undang-undang nomor 10 tahun 1995 terdapat beberapa hal baru yang dipertegas antara lain: kepabeanan; kawasan kepabeanan; fasilitas yang diberikan oleh kepabeanan, menyangkut tentang tempat penimbunan (sementara, berikat atau penimbunan pabea); penetapan besarnya bea masuk anti dumping

---

<sup>52</sup> Yunisaf Anwar dan Rusandi Endjo, Seri Himpunan Peraturan Pabeaan, PT.Bina Pena Pariwara, (BRP) 1996, hal 66.

dan bea masuk Imbalan pengendalian impor; sanksi administratif; penyidikan dan lembaga banding.

Dalam pelaksanaan bea masuk anti dumping dan bea masuk imbalan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah yaitu PP Nomor 34 Tahun 1996 yang mengatur tentang persyaratan dan pengenaan bea masuk anti dumping dan bea imbalan. Kemudian berkaitan dengan penyelesaian perselisihan tentang tuduhan dumping terhadap barang dumping atau barang yang mengandung subsidi, ditetapkan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) berdasarkan surat keputusan dari menteri perindustrian dan perdagangan nomor 136/MPP/KEP/6/1996 tertanggal 4 Juni 1996.<sup>53</sup>

### **B.3. Syarat-Syarat Telah Melakukan Dumping**

Suatu negara dapat menuduh dumping terhadap produk impor dari negara lain apabila nyata-nyata telah terbukti bahwa:<sup>54</sup>

- a. Adanya produk impor yang dijual dengan harga dumping
- b. Timbulnya kerugian (*injury*) atau ancaman kerugian
- c. Adanya hubungan secara langsung (*causal link*) antara kerugian yang timbul dengan produk yang dijual dengan harga dumping

Ketiga persyaratan tersebut harus dipenuhi agar penyelidikan terhadap dumping dapat ditindaklanjuti. Sekalipun demikian, tidak ada yang salah terhadap dumping apabila terbukti bahwa hanya dumping sebagai satu-

---

<sup>53</sup> Warta Bea Cukai edisi 271, 1997, hal 15.

satunya bukti. Maksudnya, meskipun telah terjadi produk impor dengan harga dumping, apabila tidak menimbulkan kerugian bagi produk-produk sejenis di negara pengimpor, tindakan dumping tidak dapat dikenakan terhadap barang dengan harga dumping tersebut (*deminimise*). Bahkan sebaliknya konsumen diuntungkan karena dapat memilih produk-produk alternatif lain dengan harga yang relatif lebih murah.

Demikian halnya dengan faktor yang ketiga, harus dibuktikan adanya hubungan sebab – akibat (*causal link*) antara kerugian dan atau ancaman kerugian materiil yang timbul dikarenakan adanya impor dengan harga dumping. Sebab tanpa dapat dibuktikan adanya hubungan sebab-akibat antara kedua faktor itu kerugian atau ancaman kerugian materiil yang diderita industri dalam negeri mungkin disebabkan faktor-faktor lain, misalnya menurunnya daya beli masyarakat, berkurangnya minat masyarakat terhadap produk produk yang ada di pasaran dan lain sebagainya.

### **C. Pengaruh Dumping Terhadap Perdagangan Internasional**

#### **C.1. Dumping sebagai Strategi dalam Perdagangan Internasional**

Menjual produk dengan harga dumping merupakan salah satu strategi dalam perdagangan internasional yang dilakukan oleh pelaku bisnis di pasaran ekspor dengan tujuan untuk menciptakan diskriminasi harga, dimana tujuan akhirnya adalah untuk menguasai pangsa pasar seluas-luasnya.

Biasanya, dumping dilakukan sebagai strategi bisnis eksportir untuk meningkatkan pangsa pasar yang disebabkan oleh kemampuan

---

<sup>54</sup> Ibid. Pasal 3.5, halaman 175

produsen yang bersangkutan untuk mengenakan harga tinggi di pasaran domestik karena adanya posisi monopoli yang dibangun dalam tahun-tahun sebelumnya. Untuk mendapat konsumen lain di pasar negara ke tiga, produsen tersebut mampu mensubsidi ekspornya melalui harga rendah atau melakukan subsidi silang (*cross-subsidization*) diantara produk-produk yang bersangkutan. Ada beberapa alasan mengapa eksportir melakukan dumping yaitu antara lain.<sup>55</sup>

- a. Mengembangkan pasaran baru tujuan ekspor dengan cara menurunkan harga agar tercipta insentif yang diharapkan dapat merubah keinginan konsumen atau dalam rangka mengatasi ketidakpastian mengenai kualitas ataupun daya tahan barang.
- b. Menciptakan kondisi pasar tertentu sehingga tercipta peluang lebih besar kepada produsen untuk menentukan harga di pasar ekspor maupun di pasar global.
- c. Pemasok dapat menentukan kondisi di pasaran ekspor dalam bentuk strategi penetapan harga yang agresif sehingga dapat menekan pesaing sekaligus mempersiapkan kesempatan untuk pertumbuhan jangka panjang.

Sebenarnya tidak ada yang salah dengan dumping dan tidak perlu suatu tindakan pemulihan, apabila hanya ditemukan ekspor dengan harga dumping (harga dumping hanya sebagai satu-satunya bukti). Namun demikian, apapun alasannya dumping merupakan suatu penyimpangan

---

<sup>55</sup> Anti Dumping GATT Code, Latar Belakang, Penafsiran dan Tinjauan Atas Sejumlah Tuduhan Terhadap Indonesia, Jakarta: Proyek Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Pusat, Departemen Perdagangan, 1992/1993, halaman 2-5.

terhadap suatu prinsip persaingan bebas dan jujur dalam perdagangan internasional.<sup>56</sup>

## **C.2. Kerugian Perusahaan Domestik akibat Tuduhan Dumping**

Adanya impor dengan harga dumping, pada gilirannya nanti tetap akan merugikan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap industri dalam negeri yang memproduksi produk-produk sejenis. Pada prinsipnya, kerugian akibat dumping dapat dipisahkan sebagai berikut:

### **C.2.1. Kerugian Secara Langsung.**

Adanya kerugian (*injury*) materiil merupakan syarat utama untuk dapat melakukan tindakan dumping. Adanya kerugian materiil menurut persetujuan dalam Pasal VI GATT 1994, harus didasarkan bukti-bukti (*positive evidence*) melalui pengujian obyektif terhadap:<sup>57</sup>

- a. Volume produk harga dumping dan dampaknya terhadap harga di pasar dalam negeri untuk produk sejenis
- b. Dampak impor produk tersebut terhadap produsen dalam negeri yang menghasilkan produk sejenis.

### **C.2.2. Kerugian Secara Tidak Langsung**

Tindakan dumping juga dapat dikenakan apabila negara pengimpor atau pihak-pihak yang berkepentingan merasakan adanya ancaman kerugian materiil yang disebabkan adanya barang dumping. Ancaman kerugian materiil ini dilakukan berdasarkan fakta-fakta dan

---

<sup>56</sup> Ibid, halaman 1

<sup>57</sup> Ibid. Pasal 3.1, halaman 174



bukan berdasar tuduhan yang dicari-cari alasannya, atau kemungkinan dimana terjadi perubahan keadaan dan situasi. Untuk menentukan ada tidaknya ancaman kerugian tersebut harus didasarkan pada beberapa faktor antara lain.<sup>58</sup>

- a. Laju kenaikan yang besar terhadap produk impor dengan harga dumping di pasar dalam negeri yang menunjukkan kemungkinan peningkatan yang besar;
- b. Peningkatan yang berarti terhadap kapasitas eksportir yang ditunjukkan dengan peningkatan yang signifikan terhadap ekspor dengan harga dumping ke pasar anggota pengimpor, dengan mempertimbangkan kemampuan pasar-pasar ekspor lain menyerap setiap tambahan ekspor;
- c. Adanya impor dengan harga dumping yang mempunyai akibat menekan atau menahan atas harga-harga dalam negeri, serta berakibat peningkatan permintaan impor selanjutnya;
- d. Jumlah persediaan produk yang sedang dalam penyelidikan.

---

<sup>58</sup> Ibid. Pasal 3.6, halaman 176

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan:**

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

- a. Dumping merupakan taktik bisnis dalam persaingan perdagangan yang lazim dilakukan oleh para eksportir, karena mereka mempunyai beberapa pertimbangan untuk ekspansi produknya keluar negeri. Hal yang dilarang apabila barang dumping tersebut menimbulkan kerugian atau mematikan industri domestik di pasaran luar negeri.
- b. Dumping yang dapat menimbulkan kerugian sangat diharamkan karena melanggar prinsip-prinsip perdagangan yang jujur dan merugikan kepentingan perdagangan negara anggota lain. Untuk tujuan itu, negara-negara yang tergabung dalam WTO harus mentaatinya serta mengaplikasikan ketentuan GATT 1994 beserta perjanjian-perjanjian yang menyertainya termasuk ketentuan tentang dumping.

#### **B. Saran**

Saran dan rekomendasi yang dapat disampaikan adalah:

- a. Adanya globalisasi perdagangan, pemerintah harus aktif dan selektif terhadap banjirnya produk-produk impor yang diduga sebagai barang dumping atau barang mengandung subsidi, karena produk impor tersebut dapat merugikan dan bahkan mematikan industri dalam negeri.
- b. Pemerintah juga harus menahan diri untuk tidak memberikan kemudahan/ subsidi pada eksportir yang tidak siap bersaing serta aktif memberikan

informasi kepada mereka atau asosiasinya agar sebelum melakukan aktivitas ekspor, mereka menjajaki kemungkinan harga pasar luar negeri agar eksportir tidak dituduh dumping yang pada akhirnya juga merugikan pemerintah sendiri karena adanya tindakan balasan dari negara yang dirugikan (*retaliasi*).